

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ruslan. 2021. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Edisi Revisi)*. Tangerang: Rangkang Education.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih. 2018. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo.
- Baihaqi. 2016. *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan*. Banda Aceh: UPT Perpustakaan Syiah.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung; Refika Aditama
- Fahmi Amrusi, Ni'matull Huda. 2012 Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung.
- Gatot Murniatmo. 1992. *Pola Pemukiman Rumah Inti dan Dampaknya di Magelang*. Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- G. Setya Nugraha, R. Maulina F, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya.
- Jayadi Nas Kamaluddin. 2002. Otonomi Daerah dan Kepala daerah, Hasanuddin University Press, Makassar.
- Jum Angriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Johnny Ibrahim. 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang.
- Kamal Hidjaz. 2010. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar.

- La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015.
- Manulag. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- M. Kadarisman. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali.
- Muchsan. 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muji Estiningsih. 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Nurmayani S.H., M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media. Jakarta.
- , 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saefullah Wiradipradja. 2015. *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung; Keni Media
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- SF. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok; Rajawali Pers
- Suparno Sastra dan Endy Marlina. 2007. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andi

Sule, Ernie Tisnawati, dan Saifullah. 2006. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.

S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sofyan Sari Harahap. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta: PT Pustaka Quantum.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Terry R. Garry. 1991. *Prinsip-Prinsip Manajemen Terjemahan J. Smit DFM*. Jakarta: Bumi Aksara.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

Bhenyamin Hoessein, 2002, "Kebijakan Desentralisasi", *Jurnal Administrasi Negara* Vol. II. No.02. Maret.

-----, 2002, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No. 1/Vol.1/ Juli/2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Dan Pertanian

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Internet

Pengertian Provinsi dan Kabupaten diakses melalui www.infomasi ahli.com pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 22.42 WITA

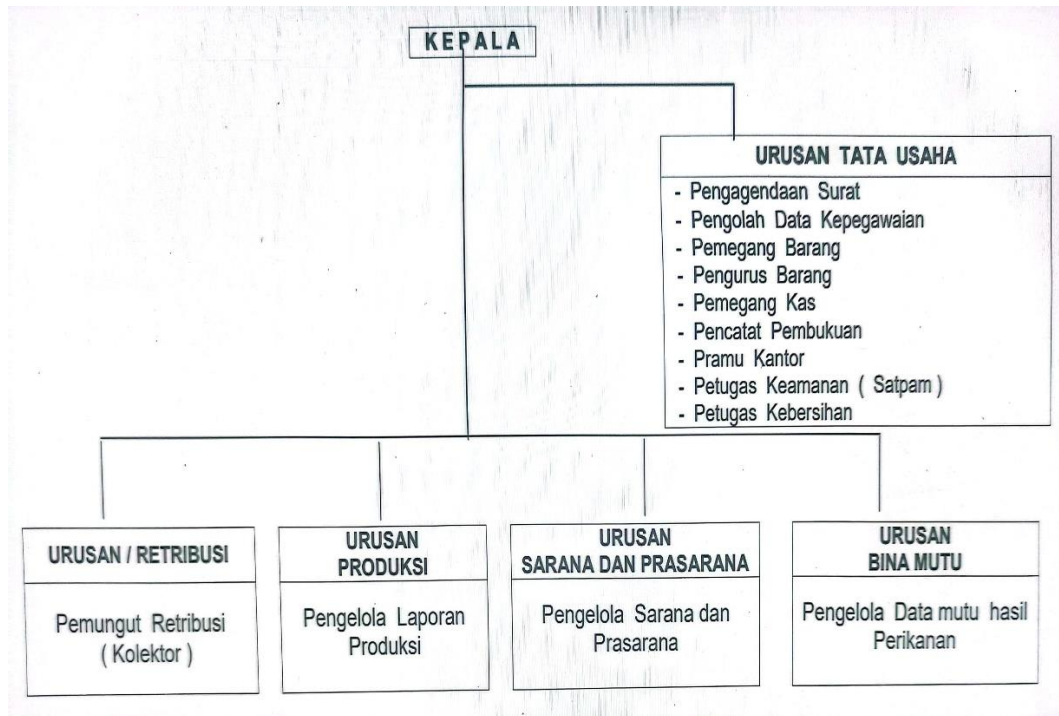
Wery Indrawan, "Keragaman Memelihara Kesehatan Hewan Ternak", Jurnal Online Mahasiswa, vol. 2, Arsitektur Universitas Tanjungpura, Rumah Sakit Hewan di Kota Pontianak, 2014, h. 2317 di akses pada 5 Juni 2023 pukul 17.03

<https://dpp.makassarkota.go.id/berita/bidang-peternakan-dan-kesehatan-hewan-melakukan-pengawasan-obat-hewan-di-kota-makassar>, di akses pada 12 Mei 2023 pukul 14.35

<https://kumparan.com/pandangan-jogja/bahaya-beli-obat-hewan-di-petshop-dan-toko-tani-bagi-manusia-1xNQGkSxqG2/full>

LAMPIRAN

STRUKTUR UPTD PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) PAOTERE



STRUKTUR UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI) PARANG TAMBUNG;

